

## **POTENSI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL dan MOBILITAS PENDUDUK DI KABUPATEN BENGKALIS - RIAU<sup>1</sup>**

**Almasdi Syahza**

**Pusat Pengkajian Teknologi dan Pembangunan Pedesaan  
(P2TP2) Universitas Riau Pekanbaru**

E-mail: [asyahza@yahoo.co.id](mailto:asyahza@yahoo.co.id) atau [syahza@telkom.net](mailto:syahza@telkom.net)

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

### **Abstrak**

Desa-desa yang tertinggal biasanya dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepadatan penduduk yang masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Untuk mengembangkan potensinya perlu dilakukan mobilisasi penduduk agar ada peningkatan interaksi dan transaksi ekonomi. Tujuan penelitian adalah memilih desa yang potensial untuk kehidupan masyarakat. Melalui diskusi yang cukup panjang dengan pemuka masyarakat setempat diputuskan bahwa luas lahan 11 ribu ha yang terletak di dua pulau desa, yaitu; Pulau Padang (Desa Tanjung Padang) dan Pulau Merbau (Desa Renak Dungun, Kuala Merbau, dan Centai) menjadi daerah pilihan program transmigrasi.

**Kata kunci:** *Desa tertinggal, mobiltas penduduk*

### **Abstract**

Undeveloped country especially in rural area, usually can be seen by several indicators such as low population density and slow economic growth. In order to develop the rural potency, mobilization of community must be carried out to increase those economic transaction and interaction. The aim of study was to select new potential areas for community lived. Through long discussion among informal leader, the study result showed that 11000 hectares land in two islands: Padang (Tanjung Padang village) and Merbau (Renak Dungun, Kuala Merbau and Centai villages), could be used for relocation program.

**Key words:** *Undeveloped country, mobilization of community*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilaksanakan selama tiga dekade belakangan ternyata belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya adalah timbul desa-desa yang miskin dan terkebelakang.

---

<sup>1</sup> Dipublikasikan pada: *Jurnal Kependudukan*, Vol 4 No.2, Juli 2002, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Desa-desanya tersebut ini sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Disamping itu masyarakat desa tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terobosan berupa program transmigrasi dan mobilitas penduduk yang memiliki seperangkat kegiatan, seperti: penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Beberapa dari daerah miskin ini sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang cukup kaya tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Oleh karena itu dengan program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah.

Karena alasan tersebut, maka pembangunan daerah Riau ke depan akan mengacu kepada "lima pilar utama" pembangunan propinsi Riau. Kelima pilar tersebut adalah: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil. Untuk menunjang kelima pilar pembangunan tersebut pemerintah daerah Riau juga melaksanakan pembangunan dibidang lain yaitu: transportasi, irigasi, dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam "5 pilar utama" pembangunan Propinsi Riau, maka perlu adanya penataan yang rasional antara penduduk dan kepemilikan lahan. Karena lahan merupakan faktor produksi yang paling penting bagi masyarakat pedesaan, sedangkan saat ini sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan besar perkebunan swasta dan pemerintah, maka untuk itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah sehingga kepemilikan lahan ini lebih rasional yang memungkinkan bagi masyarakat pedesaan untuk dapat berusaha secara lebih baik dengan luas tanah yang cukup. Ini bukan berarti bahwa lahan perkebunan swasta harus dirasionalisasi, karena lahan lain masih cukup luas untuk dimanfaatkan, misalnya lahan terlantar yang belum dimanfaatkan, lahan cadangan dan lain-lain. Penataan kepemilikan lahan dan tataruang yang disertai dengan bimbingan usaha pertanian dalam arti luas (perkebunan, kehutanan, peternakan dan tanaman pangan) akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengangkat daerah pedesaan menjadi lebih maju.

Terobosan dalam bentuk penataan tataruang lahan pertanian diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat pedesaan, sehingga pada gilirannya akan dapat sejajar dengan desa yang sudah maju lainnya. Penataan tataruang ini

dapat dilakukan melalui beberapa alternatif program, misalnya, melalui program pengembangan transmigrasi dan mobilitas baik lokal maupun antar daerah.

Desa-desanya yang miskin dan tertinggal cenderung terdapat di daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Untuk desa-desanya seperti ini potensinya untuk berkembang bisa terhambat karena jumlah penduduk yang terbatas sehingga kurang dinamis untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Disamping jumlah penduduk yang terbatas desa-desanya ini juga sulit berkembang karena terisolir, kurangnya sarana umum dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan sehingga sulit mendapatkan akses ke pasar. Dengan penduduk yang terbatas kapasitas produksi dan permintaan juga menjadi terbatas. Pendidikan bisa juga terhambat karena tidak cukup murid untuk membuka sekolah yang lebih tinggi. Desa-desanya seperti ini dapat ditingkatkan potensinya untuk berkembang dengan memindahkan atau menyatukan penduduk dari beberapa desa sehingga jumlah penduduk lebih banyak.

Program penataan pemukiman penduduk ini harus direncanakan dengan matang sehingga disamping memenuhi tiga syarat kelayakan yaitu (i) layak secara teknis/huni, (ii) layak usaha dan (iii) layak berkembang, juga harus mampu memberikan dampak positif yang maksimal (multiplier effects) terhadap penduduk lokal dan daerah sekitarnya. Untuk memenuhi ketiga kelayakan tersebut, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut sulit untuk memberdayakan masyarakat desa tertinggal, akibatnya peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan lokal juga relatif lambat.

Tujuan studi pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, kelayakan teknis dan fisik, serta kelayakan usaha desa-desanya yang diperkirakan potensial untuk dijadikan proyek pengembangan pedesaan. Selain itu studi ini juga mengidentifikasi kelayakan dari desa-desanya potensial tersebut dilihat dari kemungkinannya untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru pada masa mendatang.

Sasaran akhir dari studi ini adalah untuk menghasilkan calon lokasi dari proyek pengembangan pedesaan. Secara spesifik output yang akan dihasilkan adalah: (1) tersaringnya kawasan-kawasan yang dapat dikembangkan untuk program mobilitas penduduk; (2) diketahuinya jenis komoditas yang layak dikembangkan guna peningkatan pendapatan masyarakat; (3) diketahuinya prioritas program untuk pengembangan wilayah; (4) sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijaksanaan (birokrasi pemerintahan).

## METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat survey dengan metode perkembangan (Developmental Research), untuk itu perlu ditetapkan, antara lain:

### Lokasi Studi

Studi ini dilakukan di daerah Kabupaten Bengkalis dengan pemilihan lokasi dilakukan secara **purposive** di daerah pedesaan dengan pertimbangan jumlah desa potensial, keluarga prasejahtera dan jumlah penduduk per kecamatan. Daerah kecamatan yang diambil sebagai sampel adalah Kecamatan Merbau yang berdasarkan musyawarah dengan pihak pemberi dana atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **Cara Pengambilan Sampel**

Untuk setiap lokasi desa yang terpilih, pengambilan sampel masyarakat prasejahtera digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpencaran, karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang beragam, dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui kuesioner dan wawancara secara mendalam.

### **Jenis, Sumber Data dan Variabel yang diukur**

Variabel yang diukur dalam studi ini adalah variabel yang diperlukan untuk menilai kelayakan suatu pembangunan yang meliputi kelayakan teknis/huni, kelayakan usaha dan kelayakan berkembang di masa depan. Untuk mengetahui ketiga kelayakan tersebut maka diperlukan data-data yang dapat memberikan informasi dalam studi ini, antara lain: (1) data kebijaksanaan pembangunan daerah; (2) data wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan; (3) data rencana tata ruang wilayah; (4) data ekonomi wilayah; (5) kondisi sosial dan kependudukan; (6) pola kegiatan usaha, kesesuaian lahan dan keunggulan komparatif; (7) data kelayakan usaha potensial/komoditas unggulan (8) data kependudukan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek.

Selain dari data primer juga diperlukan data sekunder yang dikumpulkan dari kantor dan instansi yang terkait. Dimana data sekunder ini akan dikonfirmasi dengan informasi dan data primer yang didapatkan ditingkat lapangan.

### **Analisis Data**

Menyaring kawasan yang potensial untuk dikembangkan dengan analisis peta-peta, seperti; kesesuaian lahan, padu serasi, dan land use yang di overlay satu sama lain. Overlay peta-peta ini akan dihasilkan peta ketersediaan lahan. Pembuatan peta ketersediaan lahan dilakukan dua tahap, **tahap pertama**; overlay dari peta-peta yang ada dengan informasi dari data sekunder dan primer yang sudah ada. Peta ketersediaan yang dihasilkan akan dibawa ke lapangan untuk konfirmasi data yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Pada **tahap kedua**; data dan informasi primer dari lapangan dimasukkan ke dalam peta dasar (kesesuaian lahan, padu serasi, dan land use) kemudian peta-peta ini di overlay lagi untuk mendapatkan peta ketersediaan lahan yang akurat.

Karena program ini tidak terfokus pada perpindahan penduduk tetapi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa, maka lahan yang tersedia akan lebih banyak ditentukan oleh kesesuaian lahan, sedang rencana peruntukan lahan (*recommended land use*) diperkirakan masih dapat dirundingkan dengan masyarakat.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

## 1. Kependudukan

### Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebaran penduduk di Kawasan perencanaan secara administrasi pemerintahan (desa/kelurahan) menunjukkan pola yang tidak merata dan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, seperti di Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bandul dan Desa Kuala Merbau. Sementara tingkat kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa/Km<sup>2</sup> (bruto). Kepadatan tertinggi terdapat di Desa Bandul (141 jiwa/Km<sup>2</sup>) dan terendah terdapat di Desa Lukit (7 jiwa/Km<sup>2</sup>), sedangkan untuk desa-desa lainnya, bervariasi antara 14 – 45 jiwa/Km<sup>2</sup>.

### Mata Pencarian Penduduk

Sebagian besar penduduk Kecamatan Merbau bermatapencarian dari sektor pertanian yakni sebanyak 13.585 jiwa atau sebesar 87,82 persen. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini disebabkan karena daerah Kecamatan merbau berpotensi untuk sektor pertanian, disamping itu karena belum berkembangnya usaha disektor lain (Tabel 1).

Tabel 1. Mata Pencarian Penduduk Di Kecamatan Merbau Tahun 1999

No	Uraian	Jiwa	(%)
1	Pertanian	13.585	87,82
2	Perdagangan/hotel /restoran	310	2,00
3	Jasa-jasa	568	3,67
4	Angkutan & Komunikasi	109	0,70
5	Bangunan & Konstruksi	96	0,61
6	Industri Pengolahan	533	3,45
7	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	60	0,39
8	Listrik, Gas & Air Minum	45	0,29

Sumber: Monografi Kecamatan Merbau Tahun 1999

### Tingkat Pendidikan Penduduk

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Merbau tingkat pendidikannya tidak/belum sekolah/tidak tamat SD yaitu sebanyak 38,31 persen. Tingginya angka ini disebabkan antara lain; masih banyaknya anak usia belum sekolah. Untuk tingkat SD dan seterusnya memperlihatkan angka yang

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikannya (Sampai Tahun 1999)

No	Uraian	Jiwa	(%)
1	Tidak/belum sekolah/tidak tamat SD	16.545	38,31
2	Tidak Tamat SD	12.253	28,37
3	Tamat SD Sederajat	11.106	25,72
4	Tamat SLTP Sederajati	2.022	4,68
5	Tamat SLTA Sederajat	1.403	2,42
6	Tamat Pendidikan Tinggi	214	0,49

Sumber: Monografi Kecamatan Merbau Tahun 1998

tinggi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan di Kecamatan Merbau termasuk tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk yang tamat pendidikan tinggi juga cukup tinggi (Tabel 2).

### Potensi dan Penyerapan Angkatan Kerja

Berdasarkan golongan umur maka penduduk usia kerja/produktif (> 10 tahun) berjumlah 32.451 jiwa (75,15%), penduduk bukan usia kerja atau belum/tidak produktif (0 – 9 tahun) berjumlah 10.732 jiwa (24,85%). Tahun 1999 jumlah angkatan kerja sebesar 19.093 jiwa dan yang sudah bekerja sekitar 15.469

jiwa. Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 58,84% dan angka kesempatan kerja (AAK) sebesar 81,02%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa TPAK terhadap penduduk usia kerja relatif tinggi, dan AAK menunjukkan tingkat pengangguran (orang yang mencari kerja) di Kecamatan Merbau sangat rendah.

### **Kondisi Sosial Budaya**

Kecamatan Merbau merupakan bagian dari wilayah Riau yang terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Cina dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaur, berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

### **Proyeksi Penduduk.**

Berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata 2,66 % per tahun dan dengan metode proyeksi regresi linier, maka perkiraan jumlah penduduk di Kecamatan Merbau pada tahun 2004 sekitar 51.271 jiwa dan pada tahun 2009 menjadi sekitar 59.061 jiwa.

## **2. Struktur Perekonomian Kecamatan Merbau**

Berdasarkan besarnya kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB kawasan perencanaan terdapat 3 (tiga) sektor utama, yaitu :

### **Sektor Pertanian**

Kontribusi sektor pertanian pada tahun 1999 sebesar Rp. 80.161.640.000 atau 75,75% dari total PDRB Kawasan perencanaan. Komoditi tanaman bahan makanan yang diusahakan penduduk ( disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4), terdiri dari:

- Komoditi padi-padian (padi sawah) seluas 200 Ha (7,47%) dengan total produksi 757,9 ton
- Komoditi Umbi-umbian/biji-bijian (ubi kayu, Jagung, Ubi jalar) 79 Ha dengan total produksi sebesar 1.064,78 ton
- Komoditi sagu seluas 2400 Ha dengan total produksi 51.360 ton

- o Komoditi Sayuran (sawi, kangkung, bayam, cabai, ketimun) seluas 118 Ha dengan tital produksi sebesar 3.322 ton

Tabel 3 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan (Ha) di Kecamatan Merbau

Uraian	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Sagu	Ketela Pohon	Jumlah
Luas Panen (Ha)	165.00	35.00	16.00	2,400.00	63.00	2,679.00
Produksi (ton)	669.90	88.90	53.00	51,360.00	1,011.78	53,183.58

Sumber: Bengkalis Dalam Angka Tahun 1999

Tabel 4 Luas Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

Uraian	Tomat	Bayam	Kangkung	Kacang Panjang	Cabe	Ketimun	Jumlah
Luas Tanman	5	3	5	89	4	12	118
Produksi	21	9	12	123	24	21	210

Sumber : Bengkalis Dalam Angka Tahun 1999

Tabel 5 Luas dan Produksi Perkebunan Menurut di Kecamatan Merbau Bengkalis Tahun 1999

Uraian	Karet	K.Sawit	Kelapa	Kopi	Cokelat	Jumlah
Luas (Ha)	7736	-	2225	33		9994
Produksi (ton)	2,807.80	0.00	1,250.70	4.97	0.00	4,063.47

Sumber : Bengkalis Dalam Angka Tahun 1999

Komoditi perkebunan rakyat yang telah diusahakan meliputi: karet 7.895 Ha, Kelapa 2.225 Ha, kopi 34 Ha, coklat 14 Ha, Kapuk/randu 1 Ha. Total luas areal perkebunan di kawasan perencanaan 10.153,5 Ha atau 7,53% dari total luas areal kawasan perencanaan (Tabel 5).

Ternak yang masih banyak dipelihara di kawasan perencanaan, meliputi: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras/kampung, itik. Populasi ternak peliharaan pada tahun 1999 tercatat sebanyak 11.615 ekor, sedangkan pada tahun yang sama jumlah ternak potong tercatat 14.436 ekor.

Usaha perikanan di kawasan perencanaan didominasi oleh usaha perikanan laut, berupa penangkapan diperairan/laut lepas dan budidaya tambak serta jaring terapung, sedangkan untuk perikanan air tawar belum banyak diusahakan. Potensi ikan di kawasan perencanaan berupa ikan kakap, tenggiri, parang, biang-biang, lome, udang, kepiting, gerot pari, kurau, malong, duri dan talang-talang. Jenis ikan tawar yang dibudidayakan adalah jenis ikan mas dan mujair nila. Produksi perikanan laut (1999) sebesar 9.726,70 ton (2,78% dari total kabupaten) dengan nilai produksi Rp 10.464.993.020,-

Luas hutan di kawasan perencanaan mencapai 90.874 Ha (67,73% dari total luas lahan kawasan perencanaan) berupa hutan negara yang tersebar di Pulau Padang (65.908 Ha) dan di Pulau Merbau (24.966 Ha).

### **Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Kontribusi sektor ini sebesar Rp 767.280.000 atau sekitar 0,72 dari total PDRB kawasan perencanaan, yang terdistribusi kepada kegiatan perdagangan dan pariwisata.

Jenis perdagangan yang terbentuk di kawasan perdagangan adalah pola perdagangan lokal/eceran, sedangkan perdagangan skala menengah/besar masih relatif sedikit. Jumlah toko/kios/warung mencapai 140 buah, tersebar diseluruh wilayah desa. Potensi wisata yang ada adalah wisata alam hutan kawasan suaka dan wisata danau, yaitu tasik Putri Puyu yang memiliki panorama cukup indah dan berada di Pulau Padang, tepatnya di Desa Tanjung Padang. Untuk keperluan akomodasi, di kawasan perencanaan ini belum tersedia hotel yang ada hanya sebuah wisma milik Pemda Bengkalis.

### **Sektor Industri Pengolahan**

Jenis industri yang ada atau sudah dikembangkan di Kawasan perencanaan, meliputi industri besar kilang minyak bumi, kilang papan/kayu, sektor industri berupa kilang/pengolahan sagu, dan kegiatan industri yang cukup banyak adalah industri kecil/rumah tangga.

## **3. Kendala Pengembangan**

### **Sektor Pertanian**

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran produksi ditingkat kecamatan
- Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sehingga menyebabkan kesulitan pengangkutan hasil sektor pertanian
- Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan petani, sehingga menyebabkan kesulitan didalam pengolahan produk primer pertanian menjadi barang jadi
- Produktivitas hasil pertanian yang masih rendah
- Jenis komoditi belum beragam, luas areal tanah relatif masih kecil dibanding dengan kesesuaian lahan untuk pertanian

### **Sektor Pertambangan dan Penggalian**

- Potensi lahan pertambangan dan penggalian bertumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan pemukiman serta aspek lainnya
- Butuh investasi yang besar, baik pada tahap eksploarasi maupun eksploitasi
- Potensi lahan pertambangan dan penggalian umumnya masih berupa perkiraan
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih terbatas
- Pemanfaatan pertambangan dan penggalian dapat merusak lingkungan

### **Sektor Industri Pengolahan**

- Produksi industri masih mendapat kesulitan dalam pemasaran, akibat mutu dan kualitas produksi umumnya masih rendah
- Relatif masih terbatas keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, kesulitan dalam ragam produksi
- Sulit dan mahalnya biaya pengangkutan, akibat masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan yang ada



- Kemampuan manajemen yang masih terbatas, akibat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih terbatas

#### **Sektor Jasa-jasa**

- Masih terbatasnya sumber pendanaan untuk pengembangan
- Keterbatasan SDM yang memiliki spesialisasi bagi pengembangan jasa pemerintahan umum dan jasa-jasa sosial kemasyarakatan

#### **4. Potensi, Kendala, Peluang dan Tantangan Pengembangan Kecamatan Merbau**

##### **Potensi :**

1. Letak geografis Kecamatan Merbau sangat strategis yaitu berada pada lintasan pelayaran Dumai, Bengkalis, Selat Panjang, Batam dimana kota-kota tersebut merupakan pusat-pusat perkembangan skala nasional dan berskala internasional.
2. Kecamatan Merbau mempunyai potensi minyak yang cukup layak untuk dieksplorasi oleh PT. Kondur. Namun dampak potensi tersebut terhadap perkembangan kawasan perencanaan (terutama terhadap perkembangan fisik) masih kurang dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Potensi sumber daya alam melimpah terutama dari sektor perkebunan, pertanian dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Lahan untuk pengembangan kegiatan yang belum dimanfaatkan relatif masih luas.

##### **Kendala :**

1. Kondisi fisik kawasan dominan adalah bergambut (tingkat kesuburan rendah), merupakan kendala bagi pengembangan yang tentunya membutuhkan teknologi dan biaya yang relatif tinggi dan cukup rumit, untuk dapat meningkatkan kualitas fisik tanah tersebut.
2. Penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata dan terpusat di pusat-pusat pertumbuhan (kota Teluk Belitung), sedangkan di desa lainnya masih jarang.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang masih terbatas, seperti untuk perhubungan darat dan juga laut.
4. Tingkat Pendidikan dan keterampilan penduduk relatif masih rendah (SD, SMP).

##### **Peluang :**

1. Pangsa pasar yang luas yang ditunjang oleh kedudukan kawasan dalam konstelasi regional cukup menguntungkan/prospektif.
2. Masih cukup luasnya ketersediaan lahan bagi pengembangan kegiatan perkebunan dan perikanan laut.
3. Besarnya dukungan pemerintah bagi pengembangan dunia usaha di Kawasan perencanaan, dengan adanya beberapa kegiatan pasca produksi dari komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat, misalnya peningkatan produksi pengolahan sagu, pelatihan keterampilan kegiatan industri kecil/rumah tangga, serta upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pelatihan, magang dan lain-lain)

##### **Tantangan :**

1. Kelestarian lingkungan: perlindungan kawasan lindung, *cactment area*, diarahkan melindungi kelestarian sumber air baku untuk kebutuhan air bersih dan pengairan.
2. Dalam era keterbukaan/globalisasi persaingan antara tenaga kerja dari luar daerah/asing dengan penduduk lokal dalam memanfaatkan kesempatan kerja akan sangat ketat.
3. Perlu menciptakan/mencari upaya-upaya terobosan dalam teknik pengolahan lahan dan pengembangan jenis-jenis bibit tanaman perkebunan dan pertanian yang cocok, agar keterbatasan kemampuan lahan yang ada dapat teratasi dan mendapat hasil maksimal.
4. Perlu upaya dan membina pola hubungan kemitraan sejajar dalam pengembangan potensi sumber daya alam yang ada, antara masyarakat setempat dan para investor (calon investor) agar kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan yang wajar.

### **5. Animo Masyarakat Terhadap Program Mobilitas Penduduk**

Dari empat desa sampel yang disurvei, yaitu Desa Tanjung Padang (terletak di Pulau Padang), dan Desa Kuala Merbau, Renak Dungun dan Centai (terletak di Pulau Merbau) ternyata animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan mobilisasi penduduk sangat tinggi. Hal ini terkait dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan sarana dan prasarana. Mayoritas penduduk menginginkan adanya program ini dengan pola PIR sagu dan pangan, yang diprioritaskan untuk masyarakat setempat.

### **6. Analisis Pra Kelayakan**

#### ***Kawasan Potensi untuk Lokasi Mobilitas Penduduk***

Sebelum daerah calon lokasi ditentukan terlebih dahulu disurvei desa-desa dimana lokasi tersebut berada, terutama untuk menentukan batas-batas desa tersebut. Dalam pelaksanaan survei daerah potensial calon lokasi, sumber informasi yang digunakan adalah peta topografi skala 1:50.000 (BAKOSURTANAL 1985), Peta Kemampuan Tanah (Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri 1985), Peta Geologi Lembar Bengkalis dan Peta Land Suitability (RePProt, 1988). Selain itu juga digunakan peta Padu Serasi Propinsi Riau skala 500.000 tahun 1997 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Riau. Peta Padu Serasi digunakan sebagai sumber informasi dalam penentuan batas-batas hutan lindung.

Untuk menentukan batas-batas desa dan jalan, digunakan peta Kecamatan Merbau skala 1 : 36.000 yang diperoleh dari Kantor Camat Merbau. Batas-batas desa dalam peta tersebut merupakan kesepakatan masyarakat setempat, sedang untuk desa dimana calon lokasi terdapat batas-batas desa ditentukan berdasarkan konfirmasi, diskusi, dan musyawarah dengan masyarakat dan pimpinan adat yang dilakukan dalam forum pertemuan. Pada umumnya batas-batas tersebut adalah batas alam berupa sungai dan pantai. Dengan menggunakan peta dasar berupa topografi kemampuan tanah, maka informasi batas-batas tersebut bisa diplot pada peta.

Selanjutnya dengan cara yang sama dan konsultasi dengan pemuka adat serta masyarakat, maka ditentukan pula daerah calon lokasi populasi

transmigrasi. Ternyata calon daerah untuk lokasi ini melingkupi dua pulau yaitu Desa Tanjung Padang (di Pulau Padang) dan Desa Kuala Merbau, Renak Dungun dan Centai (di Pulau Merbau).

### **Daerah Calon Lokasi dan Penggunaan Lahan**

Berdasarkan peta padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Merbau skala 1 : 36.000, maka lahan yang dicadangkan untuk lokasi pengembangan dan mobilitas penduduk transmigrasi di Kecamatan Merbau ini, termasuk kawasan budidaya.

Hasil mufakat dengan pemuka adat dan pemuka masyarakat luas lahan yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi ini adalah lebih kurang 11.000 Ha yang terletak di dua Pulau (4 desa), yaitu; satu di Desa Tanjung Padang (di Pulau Padang) dan yang kedua terletak di Pulau Merbau (desa Renak Dungun, Kuala Merbau, dan Centai) yang sehamparan.

Seperti telah diuraikan di atas, berdasarkan peta TGHK dan RDTR Kawasan Kecamatan Merbau status hutan calon lokasi ini adalah hutan produksi terbatas (bekas HPH) yang dapat dikonversi (di Desa Tanjung Padang) dan hutan dataran rendah (di Desa Kuala Merbau, Renak Dungun dan Centai). Hutan inilah yang diinginkan masyarakat untuk dijadikan program transmigrasi dan mobilitas penduduk. Masyarakat sepakat hutan ini dijadikan lokasi transmigrasi asalkan program tersebut lebih mementingkan masyarakat setempat.

### **Kesimpulan**

1. Terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan pada masyarakat pedesaan, terutama antara daerah pedesaan yang terisolir dengan daerah yang terbuka dan keadaan ini cenderung bertambah buruk akibat adanya krisis ekonomi yang melanda saat ini. Untuk itu perlu adanya suatu usaha guna mengatasi keterbelakangan masyarakat pedesaan melalui suatu program yang mampu memberdayakan (*empowerment*) masyarakat tersebut.
2. Salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ini adalah keterbukaan atau akses terhadap daerah luar dengan cara membangun atau menyempurnakan sarana jalan darat.
3. Berdasarkan hasil musyawarah pemuka adat dan masyarakat maka telah dicadangkan dua lokasi untuk lokasi transmigrasi di Kabupaten Bengkalis, yaitu Desa Tanjung Padang (Pulau Padang seluas 5.000 Ha) dan Desa Kuala Merbau, Renak Dungun, dan Cintai yang lahannya satu hamparan (Pulau Merbau dengan luas 6.800 Ha).
4. Berdasarkan analisis dan pengamatan lapangan maka komoditas unggulan yang layak dikembangkan di daerah ini untuk perkebunan yaitu sagu. Tanaman pangan yang disarankan untuk hampir di seluruh daerah studi adalah tanaman padi ladang dan palawija.

## Rekomendasi

1. Salah satu usaha untuk memacu percepatan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah ini diusulkan adanya usaha pemberdayaan melalui program transmigrasi yang berpola tanaman pangan dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan potensi daerah dan kesesuaian lahan serta animo masyarakat yang sangat besar untuk mengusahakan tanaman pangan dan perkebunan.
2. Perlu adanya pengaturan kembali tatabatas peruntukan lahan karena di lapangan ditemui adanya tumpang tindih antar berbagai kepentingan, seperti tumpang tindih antara lahan garapan masyarakat dengan hutan negara (bekas HPH).
3. Perlu penegasan status lahan calon lokasi proyek transmigrasi ini untuk kepentingan masyarakat setempat sehingga tidak terjadi perubahan lahan dengan pihak yang lain yang merugikan masyarakat. Untuk itu perlu diminta surat pencadangan (peruntukkan) lahan kepada Gubernur dan atau Kanwil Kehutanan dan Perkebunan.
4. Karena ada sebahagian animo masyarakat untuk membuka tanaman pangan dan kebun sagu, karet atau kelapa sawit, maka perlu dana untuk pembiayaan. Dana pembiayaan ini dapat dilakukan dengan pola Koperasi dimana masyarakat lebih banyak berperan aktif dan lebih bertanggungjawab, sedangkan pemerintah hanya melakukan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (1997), *Kemiskinan Struktural di Perdesaan*, dalam Lokakarya Program Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Riau, Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru.
- Almasdi Syahza, (1998), *Analisis Disparitas dan Aliran Investasi di Daerah Riau*, Jurnal Penelitian Unri Volume VII/1998, Pekanbaru.
- , 1999. *Dampak Pengembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ekonomi Daerah Riau*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- , 2000, *Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dalam Hubungannya dengan Program Transmigrasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*, P2TP2 Unri dan Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Bustanul Arifin, 2001, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, (1997). *Pengwilayahan Agribisnis dan Agroindustri di Propinsi Riau*, Padang Marpoyan
- Johara T. Jayadinata (1992), *Tataguna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Kantor Statistik Daerah Tingkat II Bengkalis (berbagai tahun). "Bengkalis Dalam Angka", Tahun 2000.
- Suardi Tarumun, 1999, *Studi Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dalam Hubungannya dengan Program Transmigrasi di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar*, P2TP2 Unri dan Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Pekanbaru.

- Reijntjes. Coen, Bertus Haverkort, Waters- Bayer, 1999, *Pertanian Masa Depan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Teitelbaum, Michael (1974). *Population and development: Is concensus possible ?*, Foreign Affairs, p. 749-757.
- Todaro, Michael P (1990). *Economic development in the third world*, Fourth Edition, New York: Longman.